



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Mulai ramai dibahas, buruh tuntut kenaikan UMP 2026
Tanggal	: Kamis, 23 Oktober 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Mulai Ramai Dibahas

Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2026

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Tuntutan ini pun mendapat respons dari Komisi IX DPR yang membidaangi ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, angka tersebut bukan sekadar tuntutan politis, melainkan hasil perhitungan objektif yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168

Tahun 2024.

Menurut dia, putusan itu menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

"Inflasi dari Oktober 2024 sampai September 2025 sebesar 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,2 persen. Kalau dijumlahkan, hasilnya 8,46 persen, kami bulatkan jadi 8,5 persen," ujar

Said Iqbal, Sabtu (18/10/2025).

Iqbal menilai, dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan turunnya angka pengangguran, usulan ini tergolong realistik dan berpijak pada situasi faktual.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, tuntutan besaran kenaikan UMP 2026, sah-sah saja. Namun, kata dia, Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam kondisi

ekonomi yang belum stabil.

"Presiden sebaiknya memanggil ketua serikat buruh tingkat perusahaan yang melakukti tiap provinsi, perwakilan pengusaha, dan para kepala daerah untuk duduk bersama," ujar Irma kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (19/10/2025).

Untuk mengetahui pandangan Said Iqbal dan Irma Suryani Chaniago mengenai tuntutan besaran kenaikan UMP 2026, berikut wawancaranya.

IRMA SURYANI CHANIAGO
Anggota Komisi IX DPR

Sebaiknya, Presiden Ajak Semua Pihak

“

Ya dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi, melimpahnya pemutusan hubungan kerja. Jadi harus dilihat, apakah perusahaan mampu.



BAGAIMANA Anda melihat tuntutan KSPI yang menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen?

Saya rasa jika ada tuntutan kenaikan upah. Namun yang harus diperhatikan adalah kemampuan perusahaan.

Bagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini?

Ya dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi, melimpahnya pemutusan hubungan kerja. Jadi harus dilihat, apakah perusahaan mampu.

Apa usulan Anda agar kejakan upah bisa adil bagi semua pihak?

Usul saya, Presiden memanggil ketua serikat buruh tingkat perusahaan yang mewakili tiap provinsi, perwakilan pengusaha, dan para kepala daerah. Ada wajib dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, seperti Maluku Utara yang pertumbuhannya 10,5 persen, atau Sulawesi Selatan 20 persen. Karena itu kami menggunakan indeks tertentu sebesar 1,4. Hasilnya, di daerah seperti itu, tuntutan upah logisnya bisa mencapai 10,5 persen. Jadi kami ingin memberi ruang keadilan bagi daerah yang ekonominya memang tumbuh lebih cepat.

Apakah Dewan Pengupahan Nasional sudah mewakili semua daerah?

Dewan Pengupahan Nasional tidak mewakili seluruh provinsi. Presiden hanya mengingatkan aspirasi dari seluruh provinsi agar permasalahannya jelas.

Apa langkah lain yang perlu dilakukan Pemerintah terkait tuntutan UMP ini?

Kebutuhan kita masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi upahnya harus mencapai 10,5 persen. Jadi kami ingin memberi ruang keadilan bagi daerah yang ekonominya memang tumbuh lebih cepat.

Sebagian kalangan menilai, kenaikan tuntutan ini terlalu tinggi dan

SAID IQBAL
Presiden KSPI

Bahas UMP Sebagai Ruang Dialog Sosial

“

Kami mengingatkan agar Pemerintah tidak memutuskan sepihak tanpa dialog yang bermakna dengan perwakilan pekerja.



BOLEH dijelaskan mengenai tuntutan besaran angka kenaikan UMP 2026?

Kisaran itu memerlukan variasi pertumbuhan ekonomi di tiap daerah. Ada wajib dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, seperti Maluku Utara yang pertumbuhannya 10,5 persen, atau Sulawesi Selatan 20 persen. Karena itu kami menggunakan indeks tertentu sebesar 1,4. Hasilnya, di daerah seperti itu, tuntutan upah logisnya bisa mencapai 10,5 persen. Jadi kami ingin memberi ruang keadilan bagi daerah yang ekonominya memang tumbuh lebih cepat.

bisa membebani dunia usaha. Bagaimana Anda menanggapinya?

Kami mengerti. Baru itu ada yang merenggangkan kondisi ekonomi nasional. Justru kenaikan upah yang proporsional akan menggerakkan konsumsi rumah tangga yang merupakan perekonomian nasional.

Kalau daya beli naik, sektor produksi ikut bergerak. Jadi upahnya tidak berlebihan. Jadi upahnya tidak berlebihan, tapi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan berkeadilan.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, kondisi ekonomi saat ini juga harus

diperhatikan dalam menentukan besaran UMP?

Tahun lalu, Presiden Prabowo menggunakan indeks tertentu sebesar 1,0 karena kondisi ekonomi membaik dan angka pengangguran turun. Artinya, ada ruang fiskal dan produktivitas yang masih cukup untuk diberikan. Namun, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan menyusailkan dengan faktor makro ekonomi.

Seberapa besar pengaruh kenaikan UMP bagi masyarakat dan ekonomi?

Ketika begini naiknya harga masing-masing, maka upah harus naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. ■ NNM